

Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya

Septian Aditya S.¹, Salsabillah Azhari², Miftakhul Jannah³, Gratia Uli Septriana M.⁴, Vidya Imanuari Pertiwi⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
septianadityasaputra6@gmail.com¹, salsabillahazhari27@gmail.com²,
mjmita1232@gmail.com³, gratiaaseptriana17@gmail.com⁴,
vidya.imanuari.adneg@upnjatim.ac.id⁵

ABSTRACT

The success of development carried out by a country can be seen from the existence of its poor people. To improve community welfare, the Surabaya city government implemented a program provided by the Ministry of Social Affairs, namely the Prosperous Family Card Program. The purpose of carrying out this research is to see whether the implementation of the Prosperous Family Card Program in Wonokusumo Subdistrict the poorest subdistrict in Surabaya has gone well by George Edwards III's theory which is based on empathy and uncertainty, namely bureaucratic structure, disposition, resources and communication. This research uses qualitative methods with a phenomenological perspective with primary data sources and secondary data sources. The results of the research show that Wonokusumo Village has implemented the program optimally, where there has been good coordination between the parties involved and the tasks carried out are by applicable regulations. Likewise, Wonokusumo Village has carried out its function as a distributor of assistance for the Prosperous Family Card Program and as an organizer of socialization of the program so that it becomes better known to the public.

Keywords: Implementation; Kartu Keluarga Sejahtera; Program

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara dapat dilihat dari keberadaan masyarakat miskinnya. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kota Surabaya memberlakukan program yang diberikan oleh Kementerian Sosial yaitu Program Kartu Keluarga Sejahtera. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk melihat apakah penerapan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Wonokusumo sebagai kelurahan termiskin di Surabaya telah berjalan dengan baik sesuai dengan teori George Edwards III yang didasarkan empat unsur yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif fenomenologi dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian adalah Kelurahan Wonokusumo telah menjalankan program secara optimal dimana sudah terjalin koordinasi yang baik antar pihak yang berkaitan dan tugas yang dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Begitu juga Kelurahan Wonokusumo telah menjalankan fungsinya sebagai penyalur bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera dan penyelenggara sosialisasi akan program sehingga semakin dikenal oleh masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi; Kartu Keluarga Sejahtera; Program

PENDAHULUAN

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh pihak-pihak dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan umum (Suaib et al., 2022). Tujuan utama dari kebijakan publik ialah untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum, dan memastikan keadilan sosial. Kebijakan publik memiliki peran penting dalam masyarakat karena dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga lingkungan. Kebijakan yang baik dapat mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, dan mencegah terjadinya masalah sosial, salah satunya pada permasalahan kemiskinan (Wahab, 2021).

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Pada saat ini, kemiskinan telah menjadi masalah global yang tidak pernah hilang dan semakin melanda banyak orang di seluruh dunia (Thohari, 2022). Memberikan perhatian terhadap kemiskinan merupakan hal yang sangat penting karena permasalahan kemiskinan, khususnya di negara-negara berkembang, sangatlah rumit dan memiliki banyak aspek, mencakup berbagai faktor termasuk dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya (Jacobus et al., 2018). Dalam berbagai konteks, kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang memmanifestasikan dirinya dalam bentuk pengangguran, keterbelakangan, dan kesengsaraan.

Keinginan untuk sejahtera telah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, karena sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu menyejahterakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun hingga saat ini belum mampu mewujudkannya. Khairul (2019) dalam (Fajriani & Amir, 2022) mengartikan kesejahteraan sebagai “sesuatu atau keadaan sejahtera, aman dan tenteram”. Kesejahteraan juga bisa menjadi suatu keadaan secara keseluruhan. Negara kesejahteraan dapat dicirikan sebagai negara di mana pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara diberikan tingkat kesejahteraan hidup (Engkus et al., 2021). Untuk mendukung mewujudkan negara yang sejahtera maka diperlukan kebijakan sosial. Beberapa contoh kewajiban negara yang harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi konsep negara kesejahteraan antara lain kebijakan sosial yang menunjukkan komitmen negara dalam menjaga dan memberikan pelayanan dasar, serta perlindungan sosial terhadap kelompok rentan.

Pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi kemiskinan agar efektif dan efisien. Perlu adanya program-program yang tepat guna dan tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan yang telah lama menjadi permasalahan bangsa Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan, pemerintah mengembangkan program jaminan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Dalam hal ini diwujudkan melalui Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membangun keluarga produktif Serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (Anggleni, 2018).

Kartu Keluarga Sejahtera merupakan identifikasi bagi keluarga yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah, termasuk dalam program Sembako ini. Program ini dirancang untuk menyediakan bantuan pangan kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan akses bagi keluarga yang memenuhi kriteria tertentu kepada bantuan atau fasilitas yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga termasuk dalam kerangka usaha pemerintah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Anggleni, 2018).

Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2015 hingga 2022 Provinsi Jawa Timur menduduki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan tersebut mengalami penurunan di setiap tahunnya. Berikut jumlah penduduk miskin kab/kota Jawa Timur pada tahun 2023:



Gambar 1. Diagram batang jumlah penduduk miskin kab/kota Jawa Timur 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2024)

Berdasarkan diagram batang di atas, menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki sejumlah daerah dengan jumlah penduduk miskin yang bervariasi. Kabupaten Jember dan Malang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi, dengan angka lebih dari 200 ribu jiwa. Sebaliknya, Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun memiliki jumlah penduduk miskin terendah, dengan angka di bawah 10 ribu jiwa. Kota Surabaya dicatat memiliki jumlah penduduk miskin sekitar 136.37 ribu jiwa. Jumlah ini menempatkan Surabaya di posisi menengah dalam konteks seluruh Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 2,8 juta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, jumlah penduduk miskin yang berada pada tahun 2022 ialah

138,21 ribu jiwa yang dimana telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 152,49 dan 145,67 ribu penduduk miskin di tahun 2020. Melihat data tersebut, angka kemiskinan yang ada di kota Surabaya dapat dikatakan masih cukup tinggi sehingga pemerintah harus menekankan angka kemiskinan tersebut (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023).

Tingginya fenomena keluarga miskin di kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, mengakibatkan banyaknya anak yang tidak mampu mengakses pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Akibatnya, kualitas anak-anak dari masyarakat miskin perkotaan berada di bawah standar, sehingga banyak anak-anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan terpaksa bekerja pada usia dini (Putra, 2017). Anak-anak yang lahir dalam keluarga miskin tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Kondisi kemiskinan di Indonesia saat ini dapat dianalogikan seperti sebuah benang kusut yang sulit diurai karena faktor warisan. Untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, semua pihak, termasuk pemerintah, harus sadar dan bekerja keras. Ini termasuk pemerintah, orang tua, dan anak-anak. Selain itu, orang tua juga harus menyadari hak-hak anak mereka untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Salah satu daerah yang tergolong miskin di Surabaya adalah Kecamatan Semampir. Kecamatan Semampir sendiri merupakan kecamatan termiskin dibanding kecamatan lainnya. Persentase kemiskinan di Semampir sekitar 60,41%. Beberapa kelurahan di Kecamatan Semampir antara lain adalah Ampel, Sidotopo, Pegirian, Wonokusumo, dan Ujung. Data menunjukkan bahwa Wonokusumo menjadi kelurahan termiskin dengan persentase 18,13% dibanding dengan kelurahan yang tergolong miskin lainnya yaitu Kelurahan Sidotopo dengan presentasi 13,21%, kelurahan Ujung dengan presentasi 12,60%, kelurahan Pegirian sebesar 10,17%, dan terakhir adalah kelurahan Ampel dengan persentase sebesar 6,33% (Harjanto & Handoyo, 2019).

Wonokusumo sendiri memiliki luas wilayah sebanyak 162 hektar yang terbagi menjadi 16 RW dan 168 RT. Menurut data yang diperoleh dari arsip Kelurahan Wonokusumo jumlah penduduk Kelurahan Wonokusumo per semester II tahun 2023 adalah sebanyak 68.325 jiwa yang terdiri dari 34.032 perempuan dan 34.293 laki-laki. Hal ini menjadikan Kelurahan Wonokusumo menjadi perkampungan yang padat penduduk. Di Kelurahan Wonokusumo sendiri jumlah data Keluarga miskin yang ada per Mei 2024 adalah sebanyak 2.386 jiwa yang terdiri dari 759 KK. Sedangkan jumlah penerima kartu keluarga sejahtera sendiri hanya sejumlah 669 jiwa. Hal tersebut menjadikan tidak semua warga miskin mendapatkan manfaat dari program kartu keluarga sejahtera ini.

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris Kelurahan Wonokusumo kemiskinan tersebut dipicu karena rata-rata pekerjaan masyarakat Kelurahan Wonokusumo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya hanya menjadi seorang buruh tani maupun pedagang. Selain itu di Kelurahan Wonokusumo banyak warga masyarakat yang tidak

sekolah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini mengakibatkan mereka tidak memiliki ilmu dan keterampilan yang matang sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat sehingga memunculkan banyak pengangguran.

Berdasarkan observasi di lapangan akibat dengan tidak adanya bekal untuk mencari pekerjaan dan lapangan pekerjaan susah juga untuk didapatkan, sebagian dari masyarakat Kelurahan Wonokusumo yang tidak pandai bertani maupun berdagang lebih memilih untuk bekerja seadanya saja seperti pemulung, pengamen, dan mencari besi tua yang pendapatannya belum pasti dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan rendahnya perekonomian masyarakat Kelurahan Wonokusumo. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengatasi tingginya kemiskinan di Kelurahan Wonokusumo baik melalui pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan maupun dengan pemberian bantuan sosial.

Pemerintah kota Surabaya sendiri melalui Dinas Sosial Kota Surabaya telah menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di setiap kecamatan yang ada di kota Surabaya, dimana terdapat 31 kecamatan dan salah satunya yaitu Kecamatan Semampir serta Kelurahan Wonokusumo itu sendiri. Pembagian KKS tersebut berupa kartu debit atau ATM yang dapat berguna untuk menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari kementerian sosial. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah kota Surabaya telah melakukan kerja sama dengan bank terkait untuk melakukan pengaktifan kartu dengan penyaluran bantuan PKH akan diberikan setiap 3 bulan sekali dalam bentuk uang dengan besaran bantuan dilihat berdasarkan kategori dan BPNT akan diberikan per bulan dalam bentuk sembako. Selain dari itu, terdapat kerja sama yang dilakukan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk melakukan pembuatan aplikasi yaitu SI-MBR (Sistem Informasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang dapat mendata warga agar lebih tepat sasaran (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2022).

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis mengambil judul Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Semampir mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

TINJAUAN LITERATUR

Implementasi

Menurut (Wibowo et al., 2020) mengatakan bahwa, implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, dana, serta kemampuan operasional dari pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sedangkan implementasi menurut (Abdurrohman et al., 2015), merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Berdasarkan pengertian implementasi di atas, dapat diartikan bahwa implementasi adalah suatu bentuk kegiatan pelaksanaan atau pengadaan dari rancangan yang telah disusun. Implementasi pada Program Kartu Keluarga Sejahtera merupakan proses penerapan kebijakan yang ditujukan untuk memberikan bantuan dan manfaat pada keluarga kurang mampu agar meningkatkan kualitas hidup mereka. Proses ini dilaksanakan mulai dari pengidentifikasian keluarga penerima manfaat, penyaluran bantuan, serta *monitoring* dan evaluasi untuk mengetahui serta memastikan efektivitas dari kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya.

Pada penelitian ini, yang menjelaskan tentang implementasi program KKS menggunakan model George Edwards III, hal ini didasari oleh permasalahan penelitian yang sesuai dengan teori tersebut. Teori model ini mengukur seberapa tercapainya implementasi berdasarkan empat pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan. Pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan ini mencakup pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan saling berkaitan dengan keberhasilan atas implementasi yang dilakukan yakni: 1) Komunikasi, Dengan komunikasi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran publik, dan merespons secara cepat terhadap tantangan yang muncul selama pelaksanaan program KKS. 2) Sumber Daya, membutuhkan kerja sama dan koordinasi antar berbagai sumber daya yang tersedia, serta komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3) Disposisi, dalam konteks ini, merujuk pada keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan distribusi KKS kepada masyarakat yang berhak. 4) Struktur Birokrasi, menunjukkan kebutuhan atas struktur birokrasi yang mendukung, yang memungkinkan proses implementasi kebijakan berjalan dengan lancar dan berhasil (Diponegoro et al., 2021).

Program

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menjelaskan bahwa program adalah suatu rencana yang berkenaan dengan standar dan upaya baik dalam penyelenggaraan negara, keuangan, atau potensi lain sebagainya yang akan dilaksanakan. Suatu program dapat digambarkan sebagai permintaan untuk menyelesaikan fungsi atau tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Program dibuat secara khusus dan mempunyai pedoman perkembangan yang akan mengatur langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya (Hariyanto & Junaidi, 2023).

Program merupakan suatu kesatuan kegiatan dari suatu sistem dan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Biasanya, suatu program terdiri dari seluruh kegiatan yang dikategorikan sebagai bagian dari unit administratif yang sama, atau tujuan yang saling bergantung dan saling melengkapi, dan semua kegiatan ini perlu dilakukan secara bersamaan atau

berurutan. Selain itu program juga sering dikaitkan dengan proses perencanaan, persiapan, dan desain (Lolombulan et al., 2024).

Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2004) dalam (Syafriani et al., 2023), pengertian program dapat dibedakan menjadi dua pengertian yang berbeda, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Secara umum, program didefinisikan sebagai kegiatan masa depan yang akan dilaksanakan oleh seseorang. Sedangkan secara khusus suatu program digambarkan sebagai evaluasi terhadap satuan atau satuan kegiatan yang merupakan konsekuensi atau pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi ini dilakukan dalam suatu proses yang berkesinambungan dan berlangsung dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok individu yang terlibat.

Berdasarkan hal tersebut, program dapat dikatakan sebagai kumpulan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan disusun dalam jangka waktu pelaksanaan yang panjang. Selain itu, suatu program biasanya tidak terdiri dari satu tindakan saja, melainkan beberapa rangkaian kegiatan yang bersatu untuk membangun suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain dan memerlukan partisipasi lebih dari satu individu agar dapat terlaksana secara maksimal. Secara garis besar, program-program yang dimiliki suatu organisasi juga bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Semakin berhasil suatu organisasi menyelesaikan programnya, semakin besar kemungkinan organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan di atas, maka dapat dipertegas bahwa program adalah suatu tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, dan mempunyai tujuan tertentu. Selain itu istilah “program” juga mengacu pada suatu tindakan yang merupakan bagian dari rangkaian sistem yang beroperasi secara terus menerus dan pada akhirnya menghasilkan produksi *output*. Sebelum memulai proses pelaksanaan suatu program, penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang berbagai jenis program yang dapat dianalisis dari sudut pandang tujuan, jenis, jangka waktu, sifat, dan ruang lingkup pelaksanaan. Informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program ini dilaksanakan secara efektif.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sudut pandang fenomenologi. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengkarakterisasi fenomena yang ada saat ini, termasuk fenomena yang terjadi secara alami dan buatan manusia. Bentuk, tindakan, kualitas, perubahan, hubungan, serta persamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain yang dihubungkan pada satu hal yang sama semuanya dapat dianggap sebagai bentuk, tindakan, dan pembedaan fenomena (Rusandi & Rusli, 2021). Sumber data primer dan sekunder yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer yaitu informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber dan informan melalui wawancara terkait penelitian. Artinya untuk memperoleh data primer maka harus

dilakukan observasi dan wawancara kepada aparat dan warga Kecamatan Wonokusumo mengenai penerbitan Kartu Keluarga Sejahtera dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan peneliti (Risnawati & Arifin, 2021). Sementara itu, arsip data, publikasi jurnal, dan laman web Desa Wonokusumo dijadikan sebagai sumber data sekunder. Strategi *snowball sampling*, yaitu meminta informasi secara berulang-ulang dari satu informan ke informan lainnya untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan mendalam, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi informan dalam penelitian ini. Sekretaris Desa Wonokusumo menjadi informan utama yang selanjutnya ia usulkan kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Dinas Sosial Kota Surabaya dan Pendamping Program Kartu Keluarga Sejahtera.

Penelitian ini menggunakan model George Edwards III untuk mengkaji Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan empat komponen, model ini mengevaluasi seberapa sukses implementasinya yaitu Struktur Birokrasi: Struktur birokrasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai maksud dan tujuan, sehingga merupakan komponen penting yang harus diperhatikan agar suatu kebijakan menjadi efektif. Disposisi: Ini mengacu pada pola pikir orang yang melaksanakan kebijakan agar suatu kebijakan berhasil, orang yang melaksanakan kebijakan tersebut harus memiliki pengetahuan mengenai kebijakan tersebut dan mampu melaksanakannya. Komunikasi : Kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan tanda penting yang tidak dapat dipisahkan dari situasi apa pun, dan berperan penting dalam implementasi produk kebijakan. Sumber Daya: Ini dapat mencakup infrastruktur dan fasilitas serta sumber daya manusia. Baik dari segi kuantitas maupun kualitas, pegawai Kecamatan Wonokusumo menyediakan sumber daya manusia yang cukup. Selain itu, dapat dikatakan bahwa informasi merupakan sumber daya berharga yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan, wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, serta infrastruktur atau fasilitas lain yang membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan (Setyawan et al., 2021). Informasi penelitian ini didapatkan dari *website* Kelurahan Wonokusumo, pegawai Kelurahan Wonokusumo, pendamping program KKS Kelurahan Wonokusumo dan masyarakat Kelurahan Wonokusumo penerima Kartu Keluarga Sejahtera. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles et al., (2014) yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan elemen kunci dalam menjalankan kebijakan publik, struktur birokrasi, yang ditandai dengan prosedur operasional standar, berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam bertindak. Birokrasi memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Untuk dapat mendukung kebijakan tersebut dengan baik, birokrasi perlu menerapkan koordinasi yang efektif di antara berbagai instansi dan unit kerja yang terlibat. Koordinasi yang baik antara berbagai bagian dalam birokrasi akan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara efisien dan efektif (Nababan, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa struktur pelaksana kebijakan dalam program KKS telah jelas. Struktur organisasi dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat (Kementerian Sosial), Dinas Sosial, kecamatan hingga tingkat kelurahan serta pendamping KKS di setiap RW. Oleh karena itu, program KKS dapat berjalan dengan baik. Program KKS dijalankan sesuai dengan prosedur operasional yang telah ditetapkan, dan para aparat kelurahan, telah memenuhi tugas dalam mendistribusikan bantuan kepada masyarakat (Kaku et al., 2023). Mengingat keberhasilan pelaksanaan program ini, bantuan telah diberikan kepada masyarakat yang layak menerima, meskipun ada kekurangan yang tidak terhindarkan dalam proses distribusi.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara yang dilakukan secara langsung dengan informan staf Kesra Kelurahan Wonokusumo yakni Bapak Irza Arnaz mengungkapkan bahwa selaku petugas Kesra di Kelurahan Wonokusumo, pihak kelurahan hanya membantu dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial bertugas sebagai wadah pendistribusian atau penyaluran dalam pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bukan sebagai penentu siapa yang berhak menerima bantuan. Proses distribusi Kartu Keluarga Sejahtera di tingkat kelurahan ini meliputi identifikasi penerima manfaat, pengumpulan data, dan pelaporan hasil distribusi kepada pihak terkait untuk pemantauan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dimensi struktur birokrasi memainkan peran penting dalam tercapainya pelaksanaan program. Struktur birokrasi dianggap penting karena menentukan tugas pelaksana kebijakan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah di lapangan secara detail dan menetapkan prosedur operasional standar. Dalam pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), berbagai pihak terlibat, terutama aparat kelurahan. Untuk berhasil menjalankan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kelurahan Wonokusumo, struktur birokrasi yang mampu menyediakan penjelasan rinci mengenai tugas pelaksana kebijakan, menyelesaikan masalah yang ada, dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dan berkualitas tinggi sangat diperlukan (Ningrum & Sukmana, 2022).

Sumber Daya

Sumber daya memainkan peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dapat mendorong dan membantu implementasi yang efektif merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya manusia adalah tentang individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program

di lapangan dan sejauh mana pelaksana memahami tanggung jawabnya. Sementara sumber daya finansial digunakan untuk menentukan sumber dana yang diperoleh untuk Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Suatu kebijakan pemberian bantuan sosial pasti tidak akan terimplementasi sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan sumber daya manusia dan sumber daya finansial (Anggleni, 2018).

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan melalui wawancara dengan berbagai *stakeholder* seperti Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat, dan pendamping Program Kartu Keluarga Sejahtera Kelurahan Wonokusumo tentang implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera didapatkan hasil bahwa sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Wonokusumo sudah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta telah mematuhi aturan yang dibuat oleh kementerian sosial. Petugas yang ada di tingkat kelurahan sudah melaksanakan tugas dari kementerian sosial dengan baik untuk melakukan verifikasi awal data keluarga miskin yang diusulkan oleh Ketua RT masing-masing yang nantinya akan menjadi pertimbangan dari kementerian sosial untuk memutuskan siapa saja penerima dari Program Kartu Keluarga Sejahtera.

Selanjutnya berdasarkan sumber daya finansial peneliti melakukan wawancara dengan pendamping Program Kartu Keluarga Sejahtera dan didapatkan hasil bahwa anggaran Program Kartu Keluarga Sejahtera merupakan dana bantuan sosial dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) serta terbagi rata di seluruh Indonesia dan setiap kabupaten atau kota di Indonesia mendapatkan kuota masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Namun jumlah anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tidak semua warga yang terdaftar pada data keluarga miskin mendapatkan manfaat dari Program Kartu Keluarga Sejahtera ini. Jadi dari 2386 jiwa yang terdaftar dalam data keluarga miskin hanya 669 jiwa yang memperoleh manfaat dari Program Kartu Keluarga Sejahtera ini. Akibat dari hal tersebut memicu kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat Kelurahan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah terlaksana sesuai peraturan perundangan dan telah mengacu pada aturan dari kementerian sosial. Namun masih ditemui sedikit hambatan yaitu kurangnya sumber daya finansial berupa anggaran bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera yang mengakibatkan tidak semua warga yang terdaftar dalam data keluarga miskin mendapatkan bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera dan menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

Disposisi

Sikap atau disposisi seseorang sangat penting untuk menerapkan suatu kebijakan. karena mereka yang terlibat dalam kebijakan mempunyai keinginan, kemauan, dan kecenderungan yang tulus untuk melaksanakannya. Seorang atasan yang mempunyai sikap positif akan menjadi contoh bagi bawahannya. Dalam situasi ini, diperlukan juga perspektif yang seimbang agar kebijakan dapat dilaksanakan

sesuai dengan harapan dan benar-benar mencapai tujuan dalam bisnis (Liahati & Larasati, 2018).

Guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan, kerja sama antara atasan, pendamping, dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap seseorang. Jika berpandangan positif dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, atau justru sebaliknya (Liahati & Larasati, 2018). Sebagai penyelenggara Program Kartu Keluarga Sejahtera, Kecamatan Wonokusumo berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta program. Harus melakukan upaya berkelanjutan untuk menanamkan empati terhadap masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Program Kartu Keluarga Sejahtera akan lebih mudah dikelola dengan dibantu oleh pendamping.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan, kepala seksi kesejahteraan masyarakat, dan pendamping Program Kartu Keluarga Sejahtera Kelurahan Wonokusumo terkait Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera didapatkan hasil bahwa pihak Kelurahan Wonokusumo cukup sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera. Selain itu, Pihak Kelurahan Wonokusumo selalu mengupayakan bagi para warga miskin yang ada di Kelurahan Wonokusumo untuk rutin dalam melaksanakan pertemuan sosialisasi yang dilakukan sebulan sekali kepada warga miskin yang ada di Kelurahan Wonokusumo terkait program-program bantuan untuk warga miskin. Kemudian pihak kelurahan melakukan *monitoring* terhadap program-program yang telah dilakukan setiap bulan, tak hanya itu pihak kelurahan juga melakukan survei sebanyak 4 kali terkait penerima Kartu Keluarga Sejahtera. Begitu pula dengan para Pendamping Kecamatan Wonokusumo yang selalu hadir tepat waktu, baik hati, sabar, santun, dan rendah hati demi memberikan pelayanan terbaik kepada penerima manfaat Program Kartu Keluarga Sejahtera. Apabila penerima Kartu Keluarga Sejahtera mempunyai permasalahan, pendamping juga akan segera melakukan pendekatan. Menerima segala kekhawatiran yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera dan mengelola penyelesaiannya secara metodis dan ikhlas akan sangat membantu kemajuan dan kelancaran pelaksanaan program.

Komunikasi

Salah satu elemen utama dan paling penting dalam menilai apakah tujuan implementasi kebijakan berhasil dicapai adalah komunikasi (Sitanggang, 2021). Membangun informasi yang akurat antara pihak-pihak yang terlibat melalui komunikasi. Komunikasi memerlukan perumusan ulang kebijakan bagi para pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Kejelasan komunikasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan diterima secara eksplisit oleh pelaksana, sasaran, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Hal ini memastikan bahwa maksud, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan dapat dipahami. Jika para pembuat kebijakan menghadapi spesifikasi kebijakan yang tidak jelas, mereka tidak dapat memahami tujuan yang dimaksudkan. Selain itu,

konsistensi juga penting, sehingga kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten dan transparan untuk mencegah kebingungan di kalangan pelaksana (Ani, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan di daerah Kelurahan Wonokusumo berjalan dengan baik. Dalam menentukan pihak yang membutuhkan bantuan, diperlukannya keterlibatan atau kerja sama yang dilakukan oleh RT, RW, Kelurahan, dan Dinas Sosial dengan melakukan *survey* secara langsung kepada masyarakat dan keputusan akhir akan diberikan oleh Dinas Sosial. Pihak kelurahan terus berupaya menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan melalui program ini. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami akan program ini sehingga permasalahan tersebut diatasi dengan diadakannya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping KKS Wonokusumo. Komunikasi secara langsung banyak terjadi antara masyarakat dan pendamping KKS, dimana pada Kelurahan Wonokusumo terdapat 4 pendamping untuk 16 RW yang diturunkan secara langsung atas nama Kementerian Sosial. Dengan adanya pendamping tersebut, setiap masyarakat baik yang mendapatkan bantuan ataupun tidak mendapatkan bantuan dapat mencari informasi ataupun dapat menyampaikan permasalahan melalui pendamping KKS sehingga program yang ada dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Struktur birokrasi yang ada di Kelurahan Wonokusumo sudah cukup jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sudah terjalin koordinasi yang baik antara pihak kelurahan dengan pihak lain seperti RT, RW, Dinas Sosial mengenai penyaluran bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera. Pihak Kelurahan juga sudah menerapkan standar operasional prosedur dari pihak kementerian sosial dimana kelurahan hanya mengusulkan data keluarga miskin, namun yang berhak memutuskan penerima program hanya kementerian sosial langsung.

Sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan dan regulasi dari kementerian sosial. Namun masih terdapat kekurangan dalam segi sumber daya finansial, dimana anggaran dari Program Kartu Keluarga Sejahtera ini masih kurang yang berakibat masih banyak warga yang terdaftar dalam keluarga miskin tidak mendapatkan bantuan dari Program Kartu Keluarga Sejahtera ini.

Disposisi atau sikap pelaksana Program Kartu Keluarga Sejahtera yang ada di Kelurahan Wonokusumo telah menjalankan fungsinya sebagai penyalur bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera. Pihak kelurahan sangat mendukung adanya Program Kartu Keluarga Sejahtera untuk masyarakat miskin. Selain itu pihak kelurahan selalu melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap bulan agar penerima bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera ini tepat sasaran.

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Kelurahan Wonokusumo sudah berjalan dengan baik. Pihak kelurahan selalu melakukan koordinasi dengan pihak RT,

RW maupun Dinas Sosial untuk melakukan survei pendataan keluarga miskin yang nantinya akan menjadi pertimbangan kementerian sosial dalam memutuskan penerima bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera. Selain itu pihak kelurahan juga selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Program Kartu Keluarga Sejahtera ini baik secara langsung maupun melalui pendamping Program Kartu Keluarga Sejahtera yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sebanyak 4 orang yang menangani 16 RW yang ada di Kelurahan Wonokusumo.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Wonokusumo Kota Surabaya cukup berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kendala mengenai data penerima program yang tidak sesuai yang berakibat tidak meratanya bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera. Selain itu kurangnya sumber daya finansial yang mendukung penyaluran Program Kartu Keluarga Sejahtera mengakibatkan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.

Diperlukan *monitoring* dan evaluasi lebih lanjut mengenai mekanisme pendaftaran kartu keluarga sejahtera supaya dapat dilakukan melalui lingkup terkecil yaitu kelurahan, agar pembagian anggaran program kartu keluarga sejahtera ini dapat merata dan tepat sasaran. Pemerintah harus menambah program pemberdayaan masyarakat miskin seperti padat karya, pemberdayaan UMKM dan sebagainya agar masyarakat miskin tidak bergantung dengan bantuan sosial saja namun mau berusaha mencari pekerjaan maupun berwirausaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2015). Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(5). www.pajak.go.id
- Angleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1).
- Ani, S. (2018). *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng)*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2024). *Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribu Jiwa), 2021-2023*. BPS Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/421/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). *Series Kemiskinan 2018-2022*. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. (2022). Luncurkan Website SI-MBR, Data MBR Surabaya Bakal Ditempel di Balai RW. *Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya*.
- Diponegoro, M. H., Kusumawardani, S. S., & Hidayah, I. (2021). Tinjauan Pustaka Sistematis: Implementasi Metode Deep Learning pada Prediksi Kinerja Murid (Implementation of Deep Learning Methods in Predicting Student Performance: A Systematic Literature Review). *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi*, 10(2).
- Engkus, Azan, A. R., Hanif, A., & Fitri, A. T. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1).
- Fajriani, N., & Amir, W. (2022). Motivasi Kerja Perempuan Di Mini Plant Suppa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, 4(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/ijic>
- Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi Pengelolaan Zakat dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Mereduksi Kemiskinan. *Jurnal BPPK*, 16(2).
- Harjanto, N., & Handoyo, P. (2019). Strategi Adaptif Keluarga Miskin “Big Family” di Surabaya. *Paradigma*, 7(3).
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3).
- Kaku, O. B., Abdussamad, J., & Tui, F. P. (2023). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolongo. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Liahati, & Larasati, D. C. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2). www.publikasi.unitri.ac.id
- Lolombulan, G. S., Rorong, A. J., & Palar, N. R. A. (2024). Implementasi Kebijakan Jempol Hebat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(10).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications.
- Nababan, H. S. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nagasaribu I Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Medan Area.

- Ningrum, P. W., & Sukmana, H. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tanjangerono Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11276>
- Putra, F. K. (2017). Penyebab Kemiskinan di Kecamatan Semampir, Surabaya. *Kompas*.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.kompasiana.com/amp/ferdi_kurnia10/5a2c9736caf7db1825221ec4/penyebab-kemiskinan-di-kecamatan-semampir-kota-surabaya&ved=2ahUKEwjuqfWdooqGAXV7y6ACHU6_A60QFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw27C0wvYsgK8Hk_M96Z4OVD
- Risnawati, & Arifin, J. (2021). Implementasi Kebijakan Perbup No. 18/2021 (Perubahan Atas Perbup No.26/2020) Dilihat Dari Aspek Komunikasi (Studi Kasus Pada Kegiatan Bekerja Pada Kantor Desa Dambung Raya Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong). *JAPB: Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 4(2).
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Designing Basic/Descriptive Qualitative Research and Case Studies. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Setyawan, D., NC, A. P., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, 3(2).
- Sitanggang, M. (2021). *Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Syafriani, Y., Ramadhani, S., Harahap, F. A., Ahmad, A. K., Andrian, Y., Amirmusthofa, I., & Nasution, I. (2023). Impelementasi Evaluasi Program Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 2 Binjai. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 2(2).
- Thohari, A. M. (2022). Islam dan Tantangan Kemiskinan di Indonesia: Telaah Pemikiran Ali Asghar Engineer. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(2). <https://doi.org/10.22515/ajipp.v3i2.5571>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 2(2).